

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Proses Produksi

1. Pengertian proses produksi

Produksi dalam pengertian terminologi merujuk pada peningkatan manfaat dan nilai guna pada suatu barang yang dihasilkan. Dengan melibatkan proses produksi, bahan mentah dapat diubah menjadi barang yang mempunyai nilai guna lebih tinggi daripada kondisi awalnya. Kegiatan proses produksi ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan barang yang dapat memberikan manfaat maksimal kepada sebanyak mungkin orang.¹ Proses produksi, bahan mentah dikonversi menjadi barang jadi yang memiliki nilai guna lebih tinggi daripada kondisi awalnya. Tujuan utama dari kegiatan produksi ini adalah untuk menciptakan barang yang dapat memberikan manfaat optimal kepada sebanyak mungkin orang. Produksi bukan hanya tentang menciptakan barang, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif.

Sri Adi Ningsih mendefinisikan bahwa pengertian proses produksi adalah suatu proses pengubahan input menjadi output, sehingga nilai barang tersebut bertambah. Input adalah barang atau jasa yang diperlukan dalam proses produksi sedangkan output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi.² Produksi tidak harus berarti suatu proses mengubah barang yang berwujud menjadi barang yang berupa fisik seperti halnya dalam suatu pabrik. Jasa transportasi dan gudang penyimpanan barang juga merupakan suatu contoh dari proses produksi karena keduanya memberikan nilai tambah (*Value Added*).

¹ Indri, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 61.

² Sri Adi Ningsih, *Teori Ekonomi Mikro Edisi Kedua*. (BPFE Yogyakarta, 2011), 7.

Ahyari menyatakan bahwa proses produksi adalah cara, metode, atau teknik yang digunakan untuk menciptakan manfaat baru atau meningkatkan manfaat yang ada. Proses produksi dapat diartikan sebagai tahapan dalam menghasilkan produk baru atau menambahkan fungsi atau fitur pada produk yang sudah ada. Proses produksi memiliki peran yang sangat krusial bagi perusahaan karena sangat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam melayani konsumen.³ Proses produksi adalah metode atau teknik yang digunakan untuk menciptakan manfaat baru atau meningkatkan manfaat dari suatu produk mencakup penciptaan produk baru atau penambahan fungsi dan fitur pada produk yang sudah ada. Proses produksi menggambarkan tahap-tahap yang dilalui untuk menghasilkan produk akhir yang lebih bernilai bagi konsumen dimana bagi suatu perusahaan, proses produksi sangat penting karena secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen. Efisiensi, kualitas, dan inovasi dalam proses produksi dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar dan bersaing secara efektif.

2. Komponen proses produksi

Mashuri mengungkapkan bahwa proses produksi adalah faktor yang dikorbankan untuk menghasilkan produk, di mana komponen dari proses produksi disebut dengan input dan hasilnya disebut output, yang mencakup keseluruhan proses. Seorang produsen harus memahami berbagai jenis faktor produksi yang terlibat dalam pembuatan suatu produk. Teori menurut Masyhuri, faktor-faktor proses produksi dibagi menjadi empat kategori utama: lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen.

³ Ahmad Ahyari, *Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi Buku 1*, Edisi Keem. (Yogyakarta: BPFE UGM, 2014), 53.

Faktor proses produksi menurut Masyhuri diantaranya lahan dan tenaga kerja sering disebut dengan input utama (*mother is input*), sedangkan modal dan manajemen adalah hasil modifikasi dari input utama dan sering dikatakan sebagai kedua (*father is input*).⁴ Input Utama (*Mother is Input*) diantaranya Lahan dan Tenaga Kerja: Keduanya dianggap sebagai input utama karena mereka adalah sumber daya dasar yang diperlukan untuk memulai produksi. Tanpa lahan untuk menyediakan sumber daya alam dan tanpa tenaga kerja untuk mengolahnya, proses produksi tidak akan dapat berjalan. Input Kedua (*Father is Input*) diantaranya Modal dan Manajemen: Keduanya adalah hasil dari modifikasi dan pengembangan input utama. Modal adalah hasil dari investasi yang dilakukan menggunakan sumber daya lahan dan tenaga kerja, sedangkan manajemen adalah hasil dari pengembangan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja untuk mengorganisasi dan memimpin proses produksi.

a. Input (Faktor Produksi) adalah semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Input ini adalah bahan mentah atau komponen dasar yang, melalui proses produksi, akan diubah menjadi output. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing elemen input:⁵

1. Lahan (*Land*):

a. Definisi: Merupakan semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Ini termasuk tanah itu sendiri, mineral, air, dan hutan. ekonomi bukan hanya merujuk pada permukaan bumi yang bisa ditanami atau dibangun, tetapi juga mencakup semua sumber daya alam yang ada di dalamnya, seperti mineral, air, hutan, dan

⁴ Masyhuri, *Ekonomi Mikro* (Malang: UIN Malang Press, 2014), 89.

⁵ Masyhuri Mahchfudz, *Dasar-Dasar Ekonomi Mikro* (Malang: Prestasi Pustaka Publisher, 2011), 25.

bahan tambang. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam produksi karena beberapa alasan:

1. **Sumber Daya Alam:** Tanah menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam berbagai industri, seperti pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Sumber daya alam ini seringkali tidak dapat digantikan dan menjadi dasar dari banyak kegiatan ekonomi.
 2. **Tempat Produksi:** Tanah adalah lokasi di mana proses produksi berlangsung. Baik itu untuk kegiatan pertanian, lokasi pabrik, atau tempat usaha lainnya, tanah menyediakan ruang fisik yang diperlukan.
 3. **Kekayaan Alam:** Kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, seperti mineral dan bahan tambang, dapat dieksploitasi untuk menghasilkan barang yang bernilai tinggi.
- b. **Peran:** Lahan menyediakan lokasi fisik untuk produksi dan sumber daya mentah yang dibutuhkan untuk membuat produk. Sebagai contoh, tanah pertanian digunakan untuk menanam tanaman, dan tambang digunakan untuk mendapatkan mineral.
2. **Tenaga Kerja (*Labor*):**
 - a. **Definisi Tenaga Kerja**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2, tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat luas.⁶ Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam proses produksi, karena mereka

⁶ Ivana Trixie tulis “Implementasi Hak Para Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan PT Livatech,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2000–2008, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5578/3278>.

adalah salah satu penggerak utama input produksi. Tanpa tenaga kerja, sektor produksi lainnya tidak dapat beroperasi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja akan mendorong peningkatan produksi perusahaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Jumlah produksi yang meningkat akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan tenaga kerja.

b. Klasifikasi Tenaga Kerja

Tenaga kerja berdasar tingkat keahlian atau kualitasnya di bagi menjadi:⁷

1. Tenaga kerja berpendidikan adalah individu yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal di bidang tersebut. Contohnya termasuk tentara, polisi, dan banyak profesi lainnya.
2. Tenaga kerja terlatih adalah individu yang memiliki kemampuan di bidang tertentu yang diperoleh melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terlatih sangat menguasai bidang tersebut karena latihan dan praktik yang dilakukan berulang kali, contohnya termasuk dokter, mekanik, dan pilot.
3. Tenaga kerja yang tidak terampil atau tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang terutama bergantung pada tugas-tugas manual. Kategori ini mencakup individu yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, porter pasar, dan pekerjaan serupa.

⁷ Agilia Febianti et al., "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur, Jenis Kelamin, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Di Indonesia," *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 1 (2023): 198–204.

c. Indikator Tenaga Kerja

Tenaga kerja mempunyai beberapa indikator diantaranya yaitu:⁸

1. Kehadiran tenaga kerja sangat penting untuk proses operasional penting untuk menyelaraskan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan oprasional perusahaan. Aksesibilitas tenaga kerja terkait erat dengan kemahiran tenaga kerja, distribusi gender, skala gaji, dan faktor relevan lainnya.
2. Kualitas tenaga kerja Kecakapan dalam pekerjaan selalu dijadikan pertimbangan, dimana spesialisasi sangat di butuhkan dalam pekerjaan tertentu dangan jumlah yang terbatas. Jika kemampuan tenaga kerja tiak diperhatikan bisa saja membuat keterlampatan pada sistem produksi perusahaan.
3. Gender memainkan peran penting dalam menentukan sifat pekerjaan, di mana tenaga kerja pria biasanya mencakup tugas-tugas yang menunjukkan hubungan terbalik dengan yang secara tradisional terkait dengan wanita, sering melibatkan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik.
4. Kesenjangan gender dalam upah tenaga kerja sering muncul, dengan variasi yang diamati antara pekerja laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini biasanya dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti tingkat keterampilan yang berbeda, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, antara lain.

⁸ Atsna Himmatul Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2022): 64–72.

3. Modal (*Capital*):

a. Modal sering dianggap sebagai prasyarat terpenting dalam operasi bisnis. Disiplin manajemen modal menggambarkan modal sebagai entitas yang komprehensif, menggabungkan ekuitas dan dana bisnis.⁹ Modal dianggap sebagai sumber daya yang digunakan untuk reproduksi, atau sebagai barang yang digunakan untuk mempertahankan dan menambah pendapatan.¹⁰ Modal secara kategoris diklasifikasikan menjadi dua divisi yang berbeda sebagai berikut:

1. Modal tetap mengacu pada modal yang mampu digunakan berulang kali dalam proses produksi, terlepas dari keausan dan penipisan akhirnya. Contoh modal tetap meliputi mesin, bangunan, alat produksi, dan aset serupa.
2. Modal bergerak, modal yang akan digunakan selama proses produksi dan dikonsumsi dalam kegiatan produktif. Contoh modal bergerak adalah bahan bakar, bahan baku, dan sebagainya.

b. Jenis Modal Usaha

Kebutuhan modal yang digunakan dalam kegiatan produksi suatu bisnis di bedakan menjadi dua:

1. Modal investasi, yaitu modal yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun dan tersedia untuk penggunaan jangka panjang. Dana investasi biasanya merupakan bagian terbesar dari pembiayaan. Umumnya modal investasi dikeluarkan pada tahap awal

⁹ Andy Sahat Maasi Sigalingging et al., "Evaluasi Efektivitas Manajemen Modal Kerja Dalam Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan," *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)* 5, no. 1 (2024): 225–233.

¹⁰ Muhammad Yasin, *Kewirausahaan Produksi* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2020), 89.

perkembangan suatu perusahaan. Misalnya saat membeli aset seperti tanah, bangunan, atau mesin produksi.

2. Modal kerja adalah jenis modal yang memiliki umur ekonomis yang relatif singkat, biasanya tidak lebih dari satu tahun. Modal ini digunakan untuk mendanai berbagai aktivitas produksi dalam perusahaan. Contoh penggunaan modal kerja termasuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan kegiatan operasional lainnya.

Modal kerja dan modal investasi memiliki perbedaan yang signifikan dalam penggunaannya. Modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, seperti pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Di sisi lain, modal investasi digunakan untuk pembelian aset tetap, seperti mesin dan bangunan. Oleh karena itu, modal investasi yang memadai sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan modal kerja. Jika modal investasi mencukupi, maka modal kerja dapat digunakan lebih efisien untuk menjalankan produksi perusahaan dengan cepat.

c. Indikator Modal

Indikator yang digunakan dalam pengukuran modal ialah sebagai berikut:¹¹

1. Struktur permodalan suatu usaha; modal sendiri atau modal pinjaman
2. Pemanfaatan penambahan modal
3. Hambatan dalam mencari modal
4. Keadaan industri setelah penambahan modal.

¹¹ Fikri Aulia and Toni Hidayat, "Pengaruh Modal Dan Inovasi Terhadap Kinerja Umkm Kain Perca Di Kecamatan Medan Denai," *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2021): 119–132.

4. Manajemen (*Entrepreneurship*):

a. Manajemen adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam mengorganisasi faktor-faktor produksi lainnya, mengambil risiko, dan membuat keputusan dalam proses produksi.¹² Proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi suatu proses produksi. Proses produksi melibatkan berbagai tingkatan tenaga kerja, manajemen bertugas untuk mengelola mereka dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tahapan proses produksi.

b. Fungsi dari manajemen

1. Perencanaan (*Planning*)

Proses penentuan tujuan dan penetapan cara terbaik untuk mencapainya mencakup beberapa langkah penting. Pertama, dilakukan analisis situasi untuk memahami kondisi dan kebutuhan saat ini. Kedua, tujuan yang spesifik dan terukur ditetapkan. Ketiga, strategi dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut, dan rencana rinci dikembangkan untuk mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan.¹³

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Proses pengaturan dan koordinasi sumber daya organisasi, termasuk sumber daya manusia, bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mencakup pembentukan struktur organisasi, penetapan tugas, pembagian peran, serta alokasi sumber daya yang efisien.

¹² Elvin Marselina and Ridho Rokamah, "Manajemen Produksi Home Industry Keripik Galih Kurnia Usaha Desa Bubakan Kecamatan Tulaka Kabupaten Pacitan," *Niqosiyah: Journal of Economics and Business Research* 2, no. 1 (2022): 105–120.

¹³ Fita Nurotul Faizah, "Teori Produksi Dalam Studi Ekonomi Islam Modern (Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Muhammad Abdul Mannan)" (UIN Walisongo Semarang, 2018), 89.

3. Pengarahan (*Leading*)

Proses memotivasi, membimbing, dan memimpin anggota organisasi untuk bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan mencakup beberapa aspek penting. Melibatkan komunikasi yang jelas, pemberian motivasi, penerapan kepemimpinan yang inspiratif, serta pengembangan tim yang solid dan harmonis.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Proses memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan melibatkan beberapa langkah. Pertama, kinerja diukur dan hasilnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan jika, terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian, tindakan perbaikan diambil untuk memastikan tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif.

- c. Peran: Manajemen bertanggung jawab untuk menggabungkan dan mengoordinasikan lahan, tenaga kerja, dan modal dalam memproduksi barang dan jasa mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya bisnis. Pengusaha adalah individu yang mengambil risiko untuk memulai dan menjalankan bisnis.
- b. Proses pengolahan input: Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan yang mengubah input menjadi output. Kegiatan tersebut mencakup pengendalian input, pengendalian proses, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah. Proses ini terdiri dari beberapa tahap yang saling terkait dan bertujuan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar.¹⁴

¹⁴ Dwi Novitasari, *Manajemen Operasi: Konsep Dan Esensi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2022), 22.

1. Pengendalian Input melibatkan upaya untuk memastikan bahwa input yang digunakan, seperti bahan baku dan tenaga kerja, tersedia dalam kuantitas yang memadai dan memenuhi standar yang ditetapkan.
 2. Pengendalian Proses melibatkan kegiatan memantau dan mengelola langkah-langkah produksi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 3. Penggunaan Teknologi mencakup penerapan teknologi, metode, dan alat-alat untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas produksi.
- c. Output: Merupakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dari proses produksi.
3. Pengendalian proses produksi

Kelancaran proses produksi sangat dipengaruhi sistem produksi yang telah dipersiapkan sebelum perusahaan melaksanakan proses produksi. Demi kelancaran proses produksi diperlukan pula pengendalian proses produksi yang akan mengendalikan seluruh komponen penting dalam suatu perusahaan. Menurut Ahyari, fungsi pengendalian proses produksi meliputi beberapa aspek kunci yang mencakup perencanaan, penentuan urutan kerja, penjadwalan waktu kerja, pemberian perintah kerja, dan tindak lanjut dalam pelaksanaan proses produksi.¹⁵ Perencanaan dalam konteks ini melibatkan strategi untuk mencapai tujuan produksi, sedangkan penentuan urutan kerja memastikan langkah-langkah produksi dilakukan secara efisien. Penjadwalan waktu kerja menetapkan jadwal untuk setiap tahapan produksi agar tepat waktu. Pemberian perintah kerja merupakan proses komunikasi yang mengarahkan pekerjaan kepada anggota tim produksi, sementara tindak lanjut memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Semua fungsi ini

¹⁵ Ahmad Ahyari, *Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi Buku 1*, Edisi Keenam. (Yogyakarta: BPFE UGM, 2014), 53.

bersama-sama mendukung kelancaran dan efektivitas dalam proses produksi diantaranya:¹⁶

a. Perencanaan produksi

Merencanakan produksi melibatkan perencanaan tentang jenis produk apa yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang, serta berapa jumlahnya. Proses ini mempertimbangkan optimalisasi produk, yaitu mencapai tingkat biaya produksi yang paling rendah untuk efisiensi pelaksanaan proses produksi.

b. Penentuan urutan kerja

Fungsi yang menentukan urutan suatu proses produksi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan disebut penjadwalan produksi. Penjadwalan produksi mengatur urutan kegiatan kerja secara logis, sistematis, dan ekonomis, yang memastikan bahan baku diproses menjadi produk akhir atau barang jadi dengan efisiensi maksimal.

c. Penentuan waktu kerja

Fungsi yang menentukan waktu kerja kapan pekerjaan proses produksi akan dilaksanakan disebut penjadwalan waktu kerja. Penentuan waktu kerja yang tepat dan jelas sangat penting karena dapat membantu meningkatkan tingkat produktivitas kerja di perusahaan.

d. Pemberian perintah kerja

Fungsi yang menyampaikan perintah kepada bagian pengelolaan agar dilakukan sesuai dengan urutan pekerjaan yang telah ditentukan disebut pemberian perintah kerja, hal ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menghasilkan produk dalam perusahaan.

¹⁶ Idrawahyuni Idrawahyuni et al., "Analisis Penerapan Target Costing Sebagai Sistem Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus Pada UD. Winda Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan)," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 9, no. 2 (2020): 99-115.

e. Tindak lanjut dalam pelaksanaan proses produksi

Fungsi yang menindaklanjuti dalam kegiatan proses produksi disebut tindak lanjut produksi.¹⁷ Urutan kerja dan waktu kerja sudah diatur dengan baik, serta perintah kerja sudah diberikan untuk memulai suatu pekerjaan, tidak menjamin bahwa semua proses produksi akan berjalan sesuai harapan. Tindak lanjut produksi diperlukan untuk mengatasi atau mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses produksi, keterlambatan, atau gangguan lain yang dapat menghambat kelancaran produksi. Tindak lanjut ini, diharapkan perusahaan dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk menjaga agar proses produksi berjalan optimal.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Ditinjau dari terminologis, etika merupakan cabang filsafat tentang mengeksplorasi pertanyaan dasar mengenai bagaimana kita seharusnya hidup dan berperilaku. Dengan kata lain, etika dapat dianggap sebagai kajian filosofis mengenai moralitas (*ethical studies*).¹⁸ Etika membahas tentang prinsip-prinsip moral yang mendasari tindakan manusia, serta mempertimbangkan pertimbangan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam berbagai situasi kehidupan. Etika mencoba untuk memberikan panduan yang bermakna bagi individu dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.

Menurut Rafik Issa Beekun, etika merujuk pada serangkaian prinsip yang membedakan antara perilaku yang baik dan buruk. Etika

¹⁷ Sinyi Retno Mayasi and Isna Nugraha, "Pendampingan Proses Sertifikasi Sni Pada Umkm Kopi Binaan Bsn Desa Wonosalam Jombang Jawa Timur," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. 3 (2022): 1529.

¹⁸ M Nur Prabowo Setyabudi dkk, *Pengantar Studi Etika Kontemporer* (Malang: UB Press, 2017), 2.

merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif karena berperan dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah oleh individu. Istilah yang terkait erat dengan konsep etika adalah "khuluq".¹⁹ Al-Khuluq berasal dari kata dasar khaluqa-khuluqan, yang bermakna kebiasaan, tabiat, budi pekerti ini kemudian lebih dikenal dengan akhlak atau falsafah al-adabiyah. Akhlak merupakan ilmu yang memaparkan arti kebaikan dan keburukan, menerangkan apa yang wajib dan tidak harus diperbuat oleh manusia kepada yang lain, menyebutkan tujuan yang wajib digapai oleh manusia dalam perbuatannya mereka, serta memberikan petunjuk jalan guna melaksanakan apa yang wajib dilakukan.

Bisnis merupakan rangkaian aktivitas di mana para pelakunya berupaya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, namun dalam prosesnya sering kali terjadi konflik kepentingan dan bahkan persaingan yang tidak sehat. Pemahaman tentang etika bisnis sangat penting bagi para pelaku bisnis, karena etika bisnis menetapkan seperangkat prinsip moral yang membedakan antara perilaku yang benar dan salah. Perspektif Alquran, etika bisnis tidak hanya terbatas pada aspek-aspek parsial, tetapi merupakan bagian integral dari pandangan keseluruhan tentang bisnis. Etika bisnis dalam Islam mencakup norma-norma dan akhlak dalam mengelola dan menjalankan bisnis, yang didasarkan pada Alquran dan Hadits sebagai pedoman utama. Mencakup seluruh aktivitas bisnis, seperti pelayanan, transaksi, perilaku, dan hubungan antarpihak, yang semuanya harus mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Alquran dan Hadits. Keseluruhan, etika bisnis Islam adalah tentang menjalankan bisnis dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang diatur dalam ajaran Islam, dengan tujuan agar bisnis yang dilakukan mendapat berkah, dianggap

¹⁹ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam* (Banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020), 25.

baik dan benar, serta bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara luas.

Menurut Ahmad Amin, pengertian etika dalam konteks etika bisnis Islam adalah suatu ilmu yang menjelaskan konsep baik dan buruk, serta memberikan panduan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap sesama manusia.²⁰ Etika bisnis Islam menetapkan batasan moral yang mengatur tujuan dan tindakan manusia dalam konteks bisnis, serta memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana seharusnya perilaku dan tindakan dilakukan. Etika bisnis Islam tidak hanya memandang bisnis sebagai sekedar mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik dan bermanfaat. Etika bisnis ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap nilai-nilai moral dalam setiap aspek kegiatan bisnis.²¹ Etika, atau akhlak, dipandang sebagai ilmu yang menjelaskan konsep moralitas, serta memberikan pemahaman tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap sesama manusia. Etika memberikan arahan bagi individu dalam tindakan mereka, Tujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama. Melalui pengertian ini, etika bukan hanya menetapkan standar perilaku yang diharapkan, tetapi juga menunjukkan jalan untuk mencapai tujuan tersebut melalui tindakan yang tepat dan bertanggung jawab.

Al-Qur'an dan hadis merupakan rujukan dari etika bisnis Islam karena didalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang perilaku individu dalam melakukan kegiatan bisnis. Etika bisnis sebagai seperangkat prinsip, wajib dipatuhi oleh pelaku bisnis agar usahanya berjalan sesuai dengan ketentuan ajaran islam. Etika bisnis Islam

²⁰ Debi Cahyani, "Dunia Usaha Dan Hubungannya Dengan Etika Bisnis Islam," *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2023): 163.

²¹ Wijayanti Badroen, D., S. S. Wibowo, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran Padang Sederhana Di Jakarta," *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra* 1, no. 1 (2018): 35.

berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan tindakan para pelaku bisnis. Kehadiran etika bisnis Islam menjadi penting agar dalam mengelola bisnis seorang pengusaha dapat selalu berpandangan yang positif, dengan menerapkannya pelaku bisnis lebih memahami nilai-nilai moral didunia bisnis, sehingga mereka bisa mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah untuk menjalankan bisnis secara berkeadilan dan bermoral.

Rasulullah selalu menekankan pentingnya kejujuran dalam menetapkan harga, penggunaan timbangan, dan kualitas produk. Prinsip-prinsip ini mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat Islam yang menjadi dasar dari etika bisnis islam yakni kumpulan perilaku bisnis yang etis dan selalu berpedoman pada batasan syariah, yang disebut sebagai dhawabith syariyah atau *general guideline*.²² Perilaku etis merujuk pada tindakan untuk selalu melaksanakan apa yang di perintah Allah SWT dan menjauh dari segala larangannya yang juga dapat dijelaskan sebagai konsep mengenai apa yang dianggap baik, buruk, atau salah berdasarkan moralitas. Etika bisnis islam mengacu pada serangkaian norma serta prinsip bagi pelaku bisnis untuk berkomitmen pada prinsip itu baik dari segi interaksi, perilaku, maupun hubungan mereka, dengan tujuan mencapai sasaran bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²³ Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek bisnis dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan dari etika bisnis Islam adalah mencapai sasaran bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Mematuhi etika bisnis Islam, pelaku bisnis diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan umum secara berkelanjutan.

²² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: kencana, 2006), 70.

²³ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3.

2. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Membangun sistem moral ekonomi tidak hanya memerlukan perangkat kelembagaan yang secara formal berlaku, tetapi juga perangkat ilmu yang secara teoritis dapat diterapkan.²⁴ Membangun sistem moral ekonomi memerlukan tidak hanya struktur kelembagaan yang diterapkan secara formal, tetapi juga fondasi ilmiah yang kuat. Aturan dan regulasi yang ditetapkan secara resmi, juga diperlukan landasan teoritis yang dapat memandu prinsip-prinsip moral dalam konteks ekonomi. Perangkat ilmu mencakup teori ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika ke dalam analisis ekonomi, serta filosofi yang membahas prinsip-prinsip moral yang mendasari tindakan ekonomi. Pengembangan sistem moral ekonomi melibatkan baik struktur formal yang mengatur tindakan ekonomi, maupun penelitian dan pengembangan teoritis yang mendukung landasan nilai dan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Etika Islam mengandung aksioma-aksioma dasar yang telah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana Muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari interpretasi kontemporer terhadap konsep-konsep fundamental nilai moral dalam Islam. Badroen menjelaskan bahwa aksioma-aksioma tersebut meliputi *unity* (persatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kehendakbebas), *responsibility* (tanggung jawab), dan *Truth* (kebenaran).²⁵ Prinsip-prinsip ini meliputi persatuan (*unity*), yang menekankan kebersamaan; keseimbangan (*equilibrium*), yang mengutamakan harmoni dalam kehidupan; kehendak bebas (*free will*), yang menghargai kebebasan individu dalam mengambil keputusan; tanggung jawab (*responsibility*), yang menekankan akuntabilitas atas tindakan; dan kebenaran (*truth*), yang mengutamakan kejujuran dan integritas. Aksioma-aksioma ini

²⁴ Hasan Ali, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 173.

²⁵ Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 89.

membentuk landasan etis yang mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan ajaran Islam.

a. Kesatuan (*Unity*)

Prinsip ini mencerminkan ketauhidan yakni sebuah dimensi vertikal dalam Islam mencakup kedalaman pemahaman seorang muslim, dimana dipandang bahwa dunia ini segalanya hanya milik Allah. Keyakinan ini muncul karena pengakuan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan dan keesaan mutlak, serta keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan. Pengaruh terbesar adalah umat Muslim hanya patuh serta melaksanakan hukum dan ketetapan Allah.²⁶ Menerapkan konsep keesaan ini, seorang pebisnis Muslim tidak boleh melakukan:

1. Mendiskriminasi pembeli, pekerja, atau pemegang saham, pemasok berdasar ras, gender maupun agama.
2. Bisa terdorong melakukan tindakan yang tidak pantas (etis).
3. Menyimpan kekayaan dengan serakah.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan merupakan konsep jujur, tidak merugikan dan tidak dirugikan, serta adil dalam bertransaksi.²⁷ Prinsip keseimbangan (keadilan) diartikan sebagai meletakkan segala sesuatu pada semestinya. Penerapan keseimbangan bisa dicapai jika bersikap adil akan segala aspek, termasuk pemenuhan hak-hak konsumen. Penting bagi pelaku bisnis agar bersikap adil, sebab perilaku adil mencerminkan ketakwaan.

Konsep keseimbangan juga dapat dipahami sebagai tuntutan bagi seorang pengusaha Muslim untuk menerapkan keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Konsep keseimbangan mendorong pengusaha muslim guna mengambil tindakan dalam

²⁶ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 33-34.

²⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 55.

berbisnis yang memberikan kesejahteraan didunia namun juga keselamatan diakhirat, bagi diri sendiri maupun orang lain. Manusia diciptakan oleh Allah dengan intelektualitas, bakat yang beragam, dan keterampilan, oleh karena itu secara naluriah diperintahkanlah mereka berkolaborasi, hidup bersama, serta saling memanfaatkan kemampuan.²⁸ Setiap individu yang terlibat dalam dunia bisnis diwajibkan untuk bertindak adil, karena sikap keadilan akan membawa mereka lebih mendekat kepada ketakwaan, sesuai dengan ajaran yang diungkapkan dalam Surah Al Maidah ayat 8.²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۸

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Maidah: 8).³⁰

Hikmah yang dibisa dipetik dari ayat diatas adalah bahwa seorang pebisnis diwajibkan menjalankan bisnisnya secara adil. Adil didalam bisnis diwujudkan lewat pemberian takaran yang sesuai pada produk, dengan memberikan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan. Prinsip keadilan dapat diterapkan dengan baik maka, hak-hak dari konsumen dapat terpenuhi dengan baik.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Individu memiliki kebebasan untuk bertindak guna mencapai tujuan hidupnya, tetapi kebebasan ini harus tetap berada dalam batas sesuai prinsip Islam. Prinsip kebebasan ini mencakup kebebasan manusia dalam melaksanakan berbagai kegiatan bisnis.

²⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 88.

²⁹ Ahmad D Faisal Badroen, Suhendra, M. Arief Mufraeni, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: KPMG, 2012), 12.

³⁰ “Al Quran Surat Al-Ma`idah Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.Id,” accessed Maret 15, 2024, <https://mushaf.id/surat/al-maidah/>.

Kebebasan ini mencakup kemampuan individu untuk mengelola, mengembangkan, dan menjalin perjanjian bisnis dengan orang lain.³¹ Kebebasan ini mencakup kemampuan individu untuk mengelola, mengembangkan, dan menjalin perjanjian bisnis dengan orang lain yang artinya, individu memiliki otonomi untuk mengatur dan memajukan usaha mereka sendiri serta membentuk kerjasama atau kontrak bisnis dengan pihak lain. Kebebasan ini memungkinkan pelaku bisnis untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan strategis, dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan, yang semuanya penting untuk pertumbuhan dan kesuksesan dalam dunia bisnis.

Hak-hak individu dihormati secara luas, hal ini mendorong individu untuk terus berpartisipasi dan memberdayakan potensinya untuk mengembangkan kreativitas dalam melakukan produksi, menjawab tantangan sosial dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat. Kebebasan tersebut tidak bersifat tanpa batas; sebaliknya, ia harus berada dalam koridor aturan dan nilai yang tidak merugikan kebebasan orang lain.³² Larangan terhadap monopoli, tindakan curang, dan praktik riba merupakan jaminan untuk menciptakan mekanisme pasar yang sehat dan memastikan kesempatan yang setara bagi semua orang. Dengan demikian, kebebasan individu bukan mutlak sebuah kebebasan tapi didalamnya mengemban tanggung jawab dan prinsip keadilan.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip kebajikan, atau yang dikenal juga sebagai ihsan, merujuk pada pelaksanaan tindakan yang baik dan memberikan manfaat kepada yang lain. Seorang pebisnis yang menerapkan prinsip ihsan akan menjalankan pekerjaannya dengan ikhlas, tanpa

³¹ Norvadewi, "Business in an Islamic Perspective (A Study of Concepts, Principles and Normative Foundations)," *Journal of Islamic Economics and Business Studies* 1, no. 1 (2015): 16.

³² Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 39.

memerlukan perintah atau tekanan. Hasil dari menerapkan prinsip kebajikan ini adalah dapat memperoleh tanggapan positif dari konsumen.³³ Seorang pebisnis yang menerapkan prinsip ihsan akan menjalankan pekerjaannya dengan penuh keikhlasan, tanpa memerlukan perintah atau tekanan eksternal. Ihsan, yang berarti melakukan sesuatu dengan kualitas terbaik dan penuh kebaikan, mendorong pebisnis untuk bekerja dengan dedikasi dan integritas tinggi dan ketika prinsip ini diterapkan, hasilnya adalah kepuasan dan tanggapan positif dari konsumen, karena mereka merasakan komitmen dan kualitas pelayanan yang diberikan. Tidak hanya meningkatkan reputasi bisnis, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Islam menitikberatkan pada tanggung jawab dan gagasan tanpa mengesampingkan kebebasan individu, yakni dalam ajaran Islam, yang diinginkan adalah kebebasan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga seorang pengusaha harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak hak karyawan, konsumen dan tengkulaknya, dan sebagai karyawan harus memenuhi tanggung jawab dalam mengemban tugas yang diberikan. Walaupun banyak orang yang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain, namun di hadapan Allah yang Maha Mengetahui, mereka tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya.³⁴

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula” (Q.S Al Zalzalah: 7-8).³⁵

³³ Juliyani, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran Padang Sederhana Di Jakarta,” *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra* 4, no. 1 (2016): 35.

³⁴ Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, 67-68

³⁵ “Al Quran Surat Al-zalzalah Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.Id,” accessed December 15, 2023, <https://mushaf.id/surat/al-zalzalah/>.

e. Kebenaran (*Truth*)

Kebenaran dalam situasi ini tidak hanya mencakup aspek kebenaran itu sendiri, tetapi juga melibatkan dua unsur lainnya, yakni kejujuran dan kebajikan. Kebenaran mengacu pada sikap, niat, dan perilaku yang benar dalam berbisnis. Etika bisnis Islam sangat memperhatikan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan terhadap potensi yang dapat merugikan dalam bisnis.

3. Etika bisnis islam dalam proses produksi

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa produksi sebagai penciptaan kekayaan dengan eksploitasi manusia kepada sumber-sumber kekayaan lingkungan. Kekayaan tersebut sangat beragam yang tersimpan di alam semesta. Seluruh kekayaan alam dapat diolah guna memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan manusia. Islam membolehkan suatu usaha yang dijalankan dengan jujur, bijaksana dan adil. Usaha yang tidak adil sangat tercela, karena usaha yang seperti itu dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap masyarakat yang nantinya menimbulkan kecurangan. Sistem ekonomi Islam harus bebas dari kesewenangan, eksploitasi model kapitalis dan kediktatoran model komunisme.

Fungsi produksi adalah untuk menciptakan barang atau jasa yang dilakukan perusahaan. Transformasi yang dilakukan terhadap kegiatan produksi guna memberikan nilai tambah.³⁶ Proses produksi diubah atau ditingkatkan sedemikian rupa sehingga bahan mentah atau komponen dasar diolah menjadi barang jadi dengan kualitas dan manfaat yang lebih tinggi. Transformasi ini dapat mencakup berbagai metode seperti peningkatan teknologi, efisiensi operasional, inovasi desain, atau perbaikan kualitas. Menambahkan nilai melalui proses produksi, produk akhir menjadi lebih berharga dan diinginkan oleh konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan profitabilitas bisnis.

³⁶ Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2015), 8.

Proses produksi dalam perspektif etika bisnis Islam memiliki keterkaitan yang kuat, karena prinsip-prinsip Islam mengharuskan setiap aktivitas bisnis, termasuk produksi, dilakukan sesuai dengan ajaran moral dan syariat Islam. Proses produksi, yang melibatkan perubahan input menjadi output untuk meningkatkan nilai guna barang atau jasa, harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kehalalan dan kebaikan produk yang dihasilkan. Tahap produksi dalam Islam harus mematuhi aturan halal-haram, memastikan bahwa bahan baku yang digunakan, proses pengolahan, dan produk akhir tidak mengandung unsur haram atau merugikan masyarakat. Komponen utama dalam proses produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen, harus dikelola dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Tenaga kerja harus diperlakukan dengan adil dan diberi upah yang layak, modal harus diinvestasikan dengan cara yang tidak melibatkan riba, dan produk yang dihasilkan harus memberikan manfaat yang baik dan tidak merugikan konsumen.³⁷

Urgensi proses produksi dari perspektif etika bisnis Islam terletak pada kewajiban untuk memenuhi standar moral dan hukum Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keberkahan dalam bisnis dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara keseluruhan. Menerapkan etika bisnis Islam dalam proses produksi, pelaku bisnis tidak hanya mengejar keuntungan materi tetapi juga berusaha untuk memperoleh ridha Allah SWT dan kesejahteraan yang holistik, baik di dunia maupun di akhirat. Etika bisnis yang terkait dengan fungsi produksi ialah yang berkaitan dengan upaya memberikan solusi atas tujuh permasalahan diatas. Solusi dari produksi yaitu berorientasi terhadap pencapaian harmoni atau keseimbangan untuk semua atau beberapa pihak yang berkepentingan dengan masalah produksi. Menjalankan kegiatan produksi hal-hal yang wajib untuk diperhatikan oleh kaum muslim ialah

³⁷ Yasin, *Kewirausahaan Produksi*, 70.

bekerja terhadap bidang yang diharamkan oleh Allah Swt dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh-Nya. Menurut Qardhawi tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu manusia dan mewujudkan kemandirian umat.

Etika bisnis Islam tidak hanya mengatur perilaku bisnis secara umum tetapi juga mencakup semua aspek produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi produk akhir.³⁸ Prinsip-prinsip seperti keadilan, tanggung jawab sosial, transparansi, dan kejujuran menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa proses produksi tidak hanya menghasilkan produk berkualitas tetapi juga memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat serta lingkungan. Tujuan produksi yang pertama, bisnis Islam sangat mendorong produktivitas dan pengembangan baik dari kualitas dan kuantitas. Islam melarang untuk tidak peduli terhadap potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta Islam sangat mendukung bahwa sumber daya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan produksi dan berbisnis. Tujuan produksi yang kedua ialah merealisasikan kemandirian umat yang artinya, seluruh umat mempunyai berbagai keahlian, kemampuan, dan perasaan yang memungkinkan agar dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Seorang produsen harus memperhatikan kewajiban sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jujur, serta jelas mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Melayani atau memperlakukan konsumen secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif

³⁸ Sari Shintya Terisna Rahmawati Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Masyarakat Modern," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2023): 1–20, www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
- e. Memberikan kesempatan terhadap konsumen untuk mencoba dan menguji barang atau jasa yang dibuat dan yang diperdagangkan
- f. Memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.

C. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 17 yang berbunyi:³⁹

1. Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong.
2. Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Hewan
 - b. Tumbuhan
 - c. Mikroba; atau
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
3. Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 18 yang berbunyi: Bahwa lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.

³⁹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)," *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

1. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. Bangkai
 - b. Darah
 - c. Babi dan atau
 - d. Hewan yang disembelih tidak sesuai syariat
2. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 21 yang berbunyi:⁴⁰

1. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal
2. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. Bebas dari najis;
 - c. Bebas dari bahan tidak halal
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 33 mengatur tentang penetapan kehalalan produk. Pasal ini menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dalam negeri atau melakukan impor produk, yang mana produk tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan sertifikat halal." Pasal ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha di dalam negeri atau yang melakukan impor produk wajib memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Hal ini

⁴⁰ Sudarmono, "Sertifikat Halal Dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Indonesia," *Transformasi* 4, no. 2 (2022): 206–231.

menunjukkan pentingnya proses penetapan kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

- a. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI.
- b. Penetapan kehalalan produk sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam sidang fatwa halal.
- c. Sidang fatwa halal MUI sebagai dimaksud mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga atau instansi terkait.
- d. Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari BPJPH.
- e. Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditandatangani MUI.
- f. Keputusan penetapan halal produk sebagai dimaksud pada ayat 5 disampaikan oleh BPJPH untuk menjadi dasar penerbit sertifikat halal.

Perkembangan teknologi yang pesat dalam proses produksi barang dan jasa, timbul tantangan bagi konsumen untuk memastikan kebenaran informasi terkait produk yang mereka konsumsi. Informasi ini mencakup komposisi bahan baku yang benar serta pengemasan yang sesuai dengan prinsip hukum agama Islam.⁴¹ Penting bagi informasi mengenai kehalalan produk harus jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk-produk tersebut. Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha wajib memperhatikan beberapa hal, seperti lokasi pembuatan yang harus bebas dari unsur haram atau najis, kondisi tempat produksi yang bersih dari kontaminasi najis, serta perawatan alat-alat produksi yang mencakup pencucian setelah digunakan dan penyimpanan di tempat yang terhindar dari najis. Konsep kebebasan dari bahan tidak halal dalam konteks ini mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan babi atau bahan-bahan lain yang diharamkan dalam

⁴¹ Lauren Tanera, "Tantangan Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Dan Transformasi Digital Dalam Bisnis Waralaba," *Jurnal Multilingual* 3, no. 3 (2023): 1412–4823.

Islam. Memperoleh sertifikasi produk halal juga menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual tambah dari produk mereka. memastikan kehalalan produk secara jelas dan komprehensif, pelaku usaha tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga membangun kepercayaan konsumen serta memperluas pasar untuk produk mereka.